



Pembuatan Elektrik Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (E-RKBMN) Berbasis Web Sebuah Upaya Penguatan UNNES Menuju PTN Badan Hukum

Agung Wiyanto¹, Widodo², Ahmad Mundir³, Guntur⁴
^{1,2,3,4}Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, Sept 29, 2023

Revisi, Okt 03, 2023

Disetujui, Okt 20, 2023

Kata kunci:

UNNES,
Elektrik,
E-RKBMN,
RKAKL.

ABSTRAK

UNNES laksana pohon terus berkembang menjadi besar dan maju. Kemajuan dan berkembangnya UNNES ditandai dengan berbagai prestasi dan pengakuan dari berbagai pihak. Tata kelola UNNES sudah baik yang ditandai sejak tahun 2011 hingga 2021 UNNES mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian/WTP dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun demikian ada tata kelola yang perlu perbaikan yaitu tata kelola penyusunan RKBMN UNNES sebagai dokumen pendukung RKAKL. Tata kelola RKBMN UNNES selama ini belum maksimal. Hal ini dikarenakan penyusunan RKBMN UNNES yang merupakan gabungan dari RKBMN uni-unit dilingkungan UNNES masih bersifat manual dalam bentuk word atau excell dan dikirim via email. UNNES belum memiliki sistem database usulan RKBMN. Hal ini berakibat apabila dibutuhkan data RKBMN mengalami kendala misalnya tidak tepat waktu dan akurat. Permasalahan tersebut yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini yaitu melalui penggunaan teknologi informasi untuk penyusunan dan pembuatan database RKBMN atau lebih dikenal e-RKBMN. Sistem informasi elektrik rencana kebutuhan barang milik negara (E-RKBMN) adalah sistem informasi penyusunan RKBMN di lingkungan UNNES dengan sistem on line dengan menggunakan database berbasis mysql. Sistem elektrik rencana kebutuhan barang milik negara (E-RKBMN) ini bisa diakses dimana pun selama perangkat komputer yang digunakan memiliki koneksi internet. Tingkat kemudahan dan kepuasan penggunaan Sistem informasi elektrik rencana kebutuhan barang milik negara (E-RKBMN) di atas 70 %.

DOI : <https://doi.org/10.59034/jpi.v2i1.11>

How to Cite :

wiyanto, A., Widodo, Mundir, A., & Guntur. (2023). Pembuatan Elektrik Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (E-RKBMN) Berbasis Web Sebuah Upaya Penguatan UNNES Menuju PTN Badan Hukum. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 2(2), 58–72. <https://doi.org/10.59034/jpi.v2i2.21>

Korespondensi Penulis:

Agung Wiyanto,
Universitas Negeri Semarang,
Jl. Sekaran Gunungpati Semarang 50229, Jawa Tengah, Indonesia.
Email: agung.wiyanto@mail.unnes.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) atau lebih dikenal sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) merupakan salah satu dokumen utama pendukung Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). RKBMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAKL atau dengan kata lain bila tidak ada dokumen RKBMN maka tidak akan bisa menyusun RKAKL.

Instansi pemerintah wajib memiliki dokumen RKBMN sebagai syarat mengusulkan RKAKL atau yang lebih sering dikenal secara masyarakat umum sebut sebagai usulan anggaran instansi pemerintah. Kewajiban dokumen RKBMN ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2014 Tentang Penyusunan RKBMN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2014 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perencanaan BMN (RKBMN) dan telah disempurnakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

RKBMN bagi instansi pemerintah adalah rencana kebutuhan dalam pengadaan baik pengadaan barang maupun jasa. RKBMN memiliki bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan antara lain inefisiensi anggaran, inefektifitas pengadaan, dan under utilisasi dalam pengelolaan BMN. RKBMN harus berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) yang telah ditetapkan.

UNNES laksana pohon terus berkembang menjadi besar dan maju. Kemajuan dan berkembangnya UNNES ditandai dengan berbagai prestasi dan pengakuan dari berbagai pihak. Tata kelola UNNES sudah baik yang ditandai sejak tahun 2011 hingga 2021 UNNES mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian/WTP dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Namun demikian ada tata kelola yang perlu perbaikan yaitu tata kelola penyusunan RKBMN UNNES sebagai dokumen pendukung RKAKL. Tata kelola RKBMN UNNES selama ini belum maksimal. Hal ini dikarenakan penyusunan RKBMN UNNES yang merupakan gabungan dari RKBMN uni-unit dilingkungan UNNES masih bersifat manual dalam bentuk word atau excell dan dikirim via email.

UNNES belum memiliki sistem database usulan RKBMN. Hal ini berakibat apabila dibutuhkan data RKBMN mengalami kendala misalnya tidak tepat waktu dan akurat. Permasalahan tersebut yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini yaitu melalui penggunaan teknologi informasi untuk penyusunan dan pembuatan database RKBMN atau lebih dikenal e-RKBMN.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan RKBMN

Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang merupakan pengertian perencanaan kebutuhan BMN didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Sementara itu pengertian RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. Perencanaan BMN bertujuan agar efektivitas, efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pengelolaan BMN dapat dicapai.

Perencana kebutuhan BMN sesuai dengan PP 27 tahun 2014 yang dirubah menjadi PP nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 9 ayat 2 meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah. Sementara itu menurut PMK 150/PMK.06/2014 perencanaan BMN meliputi perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN.

2.2. SBSK dan RKBMN

SBSK adalah Standar Barang dan Standar Kebutuhan. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan kementerian/Lembaga. Hal ini sesuai PMK248/PMK.06/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan). SBSK secara garis besar meliputi:

- a. Standar Barang dan Standar Kebutuhan tanah dan/atau bangunan

SBSK BMN untuk tanah dan atau bangunan diatur dalam PMK 248/PMK.06/2011 Tentang SBSK BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan. SBSK BMN berupa tanah dan atau bangunan berfungsi sebagai pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun Perencanaan Kebutuhan dalam bentuk pengadaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan.

SBSK BMN berupa tanah dan atau bangunan berfungsi sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dalam meneliti Perencanaan Kebutuhan BMN dalam bentuk pengadaan tanah dan atau bangunan yang disusun oleh Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang. Pengadaan BMN tanah atau bangunan dapat dilakukan dengan cara: (1) pembelian tanah yang dananya berasal dari APBN; (2) pembangunan baru bangunan atau renovasi/restorasi yang mengubah luas bangunan yang menggunakan dana APBN; (3) perolehan tanah dan/atau bangunan yang ditempuh melalui mekanisme sewa, pinjam pakai, bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BGS) dan tukar menukar.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan meliputi luas maksimum dan minimum tanah, luas maksimum bangunan serta jumlah lantai bangunan. Tanah tersebut adalah tanah yang diperuntukkan bagi Bangunan Gedung Negara.

b. **SBSK Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri**

SBSK BMN berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.

Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Jabatan, adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. SBSK kendaraan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum AADB Dinas Operasional Jabatan yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.3. Peran Teknologi Dalam Layanan

Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah layanan merupakan sebuah keharusan. Teknologi informasi menjadi alat untuk mempermudah dalam berkomunikasi dan mempercepat layanan globalisasi dan era informasi ini.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kecamatan) kepada masyarakat merupakan perwujudan nyata fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Peningkatan kemudahan dalam akses layanan publik merupakan salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah. Peningkatan kinerja selain dari motivasi pegawai juga dapat dilakukan melalui sarana yang digunakan, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pemerintah Indonesia menetapkan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam layanannya dengan istilah E-government. Penerapan E-government adalah bagian dari amanat Inpres No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan oleh karenanya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya.

E-government pada intinya adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain :

- a. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan layanan lebih cepat, tepat dan akurat tanpa membedakan pengguna layanan.
- b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan dan kemudahan dalam setiap akses layanan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

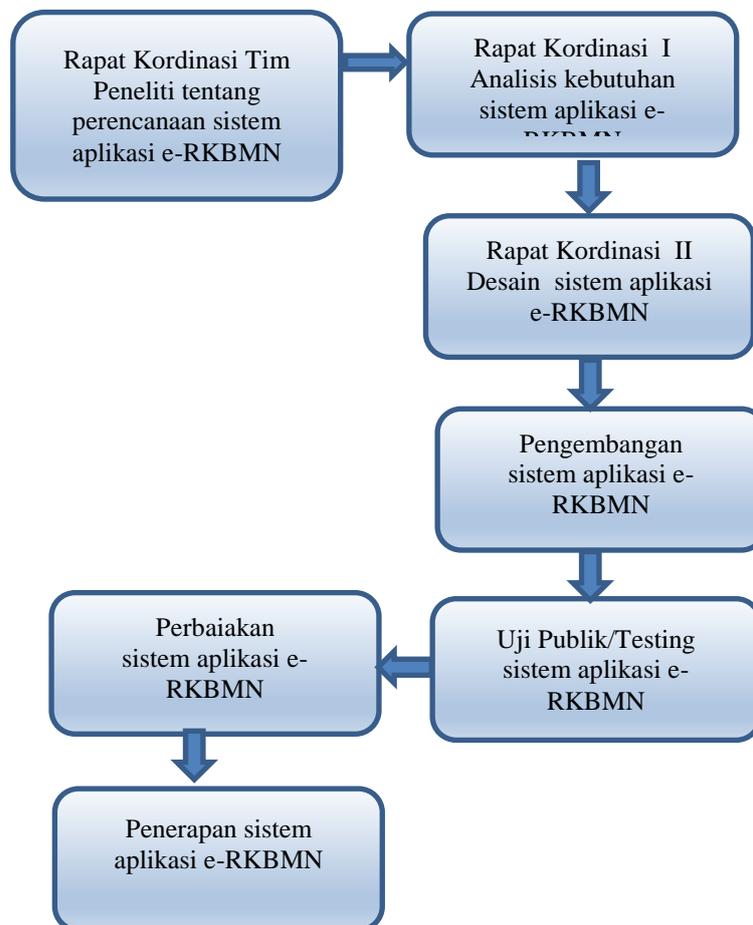
- c. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Penggunaan teknologi informatika akan mengurangi biaya misalnya kegiatan koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Indonesia dengan bentuk keperluan dengan teknologi informasi sangat dibantu.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparat pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Negeri Semarang dengan tahapan penelitian dapat dilihat sesuai dengan skema Pembuatan Aplikasi E-RKBMN.



Gambar 1. Skema Penelitian Pembuatan Sistem Aplikasi E-RKBMN

Metode Uji Kepuasan Sistem/ Uji Publik

Sistem Aplikasi E-RKBMN setelah selesai dilakukanlah uji publik untuk menilai sejauh mana sistem ini mampu menjawab permasalahan dilapangan terhadap penyusunan RKBM. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian

kuantitatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan (scoring) dengan menggunakan statistik.

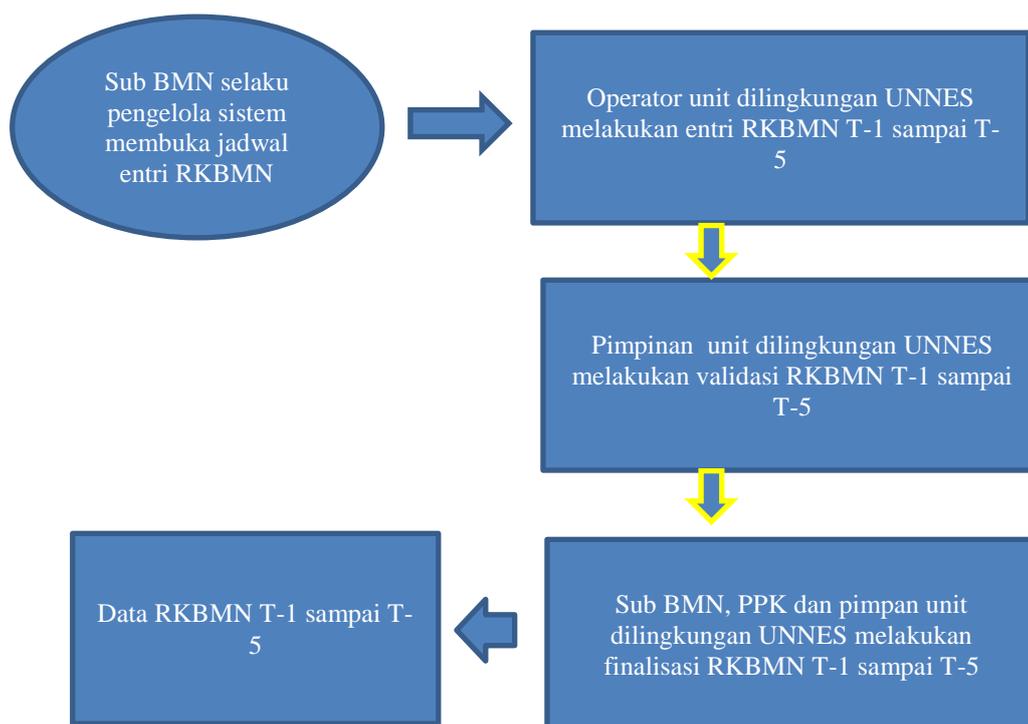
Populasi dalam penelitian ini adalah penyusun RKBMN yang terdiri pimpinan dan operator di lingkungan UNNES dengan pengambilan data melalui teknik sampling. Untuk menentukan sampling penelitian berikut, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya. Alasan digunakannya teknik purposive sampling karena peneliti hanya bisa menggunakan satu yaitu operator penyusun RKBMN di lingkungan UNNES.

Pengambilan dilakukan dengan cara menyebar quisener secara online kepada operator penyusunan RKBMN. Quisener bersifat opsional dimana sampel bisa memilih sesuai kondisi yang dialami.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Sistem E-RKBMN

Sistem informasi elektrik rencana kebutuhan barang milik negara (E-RKBMN) adalah sistem informasi penyusunan RKBMN di lingkungan UNNES dengan sistem on line dengan menggunakan database berbasis mysql. Sistem elektrik rencana kebutuhan barang milik negara (E-RKBMN) ini bisa diakses dimana pun selama perangkat komputer yang digunakan memiliki koneksi internet. Mekanisme sistem informasi E-RKBMN secara garis besar dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.



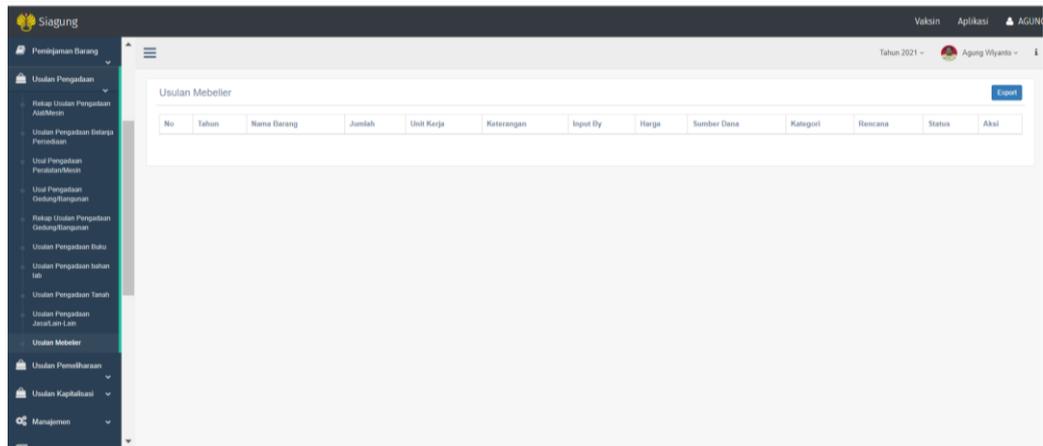
Gambar 2. Mekanisme sistem informasi E-RKBMN

Sistem informasi E-RKBMN secara garis besar memiliki user antara lain:

- Root adalah user yang memiliki kewenangan melakukan pengembangan sistem
- Admin pusat adalah user yang memiliki kewenangan membuka dan menutup, jadwal entri RKBMN, menambah user, penarikan data dan akses lainnya.
- Operator unit adalah user yang memiliki kewenangan input RKBMN dari unit masing-masing
- Pimpinan unit adalah user yang memiliki kewenangan validasi usulan RKBMN

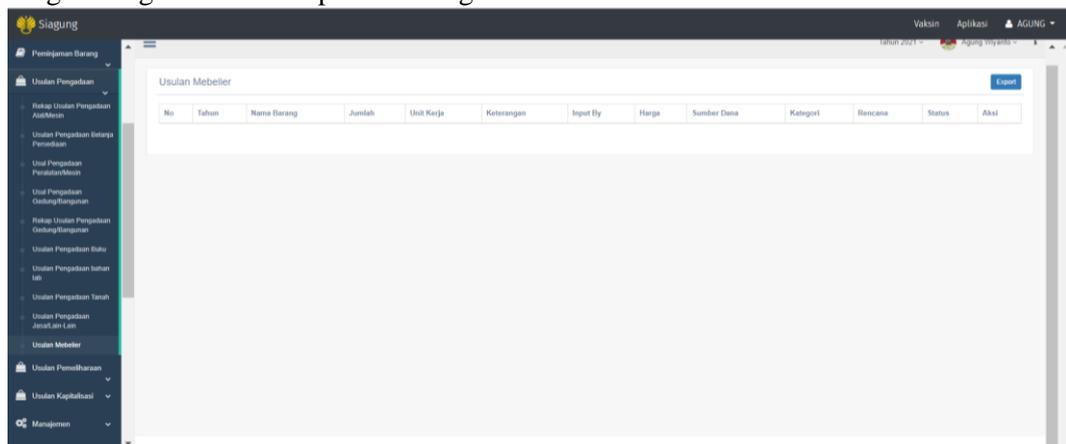
Sistem informasi E-RKBMN memiliki konten-konten antara lain:

- Usulan pengadaan barang berupa peralatan mesin, mebelier, tanah, gedung dengan rekap usulan pengadaan barang masing masing unit terdiri seperti dalam gambar 3 di bawah ini :



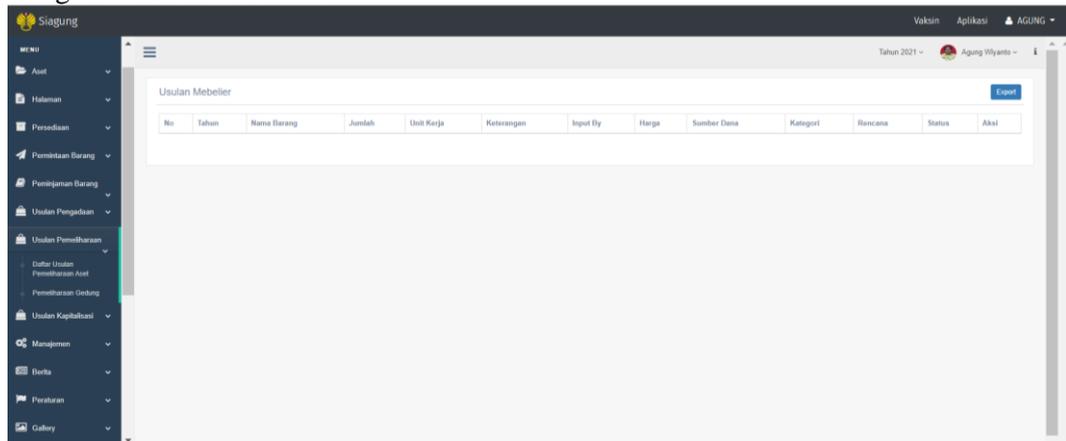
Gambar 3. Menu usulan pengadaan barang

- b. Usulan pengadaan barang presediaan dan bahan lab dengan rekap usulan pengadaan barang masing masing unit terdiri seperti dalam gambar 4 di bawah ini.



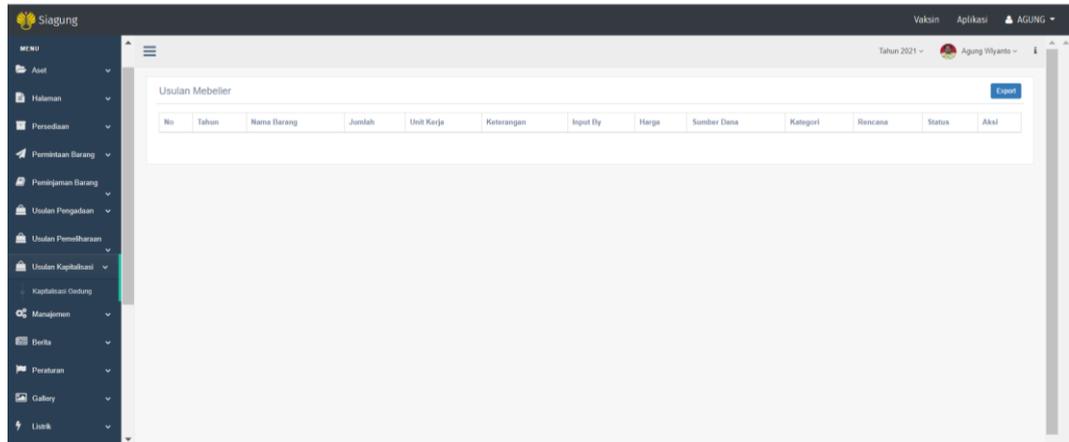
Gambar 4. Menu usulan pengadaan bahan lab

- c. Usulan pemeliharaan gedung dan aset dengan rekap usulan pemeliharaan masing-masing seperti dalam gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5. Menu usulan pemeliharaan gedung dan aset

- d. Usulan kapitalisasi gedung dan aset dengan rekap usulan pemeliharaan masing masing seperti dalam gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Menu usulan kapitalisasi gedung dan aset

4.2. Uji Publik Sistem E-RKBMN

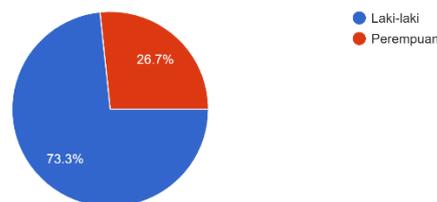
Sistem informasi dibuat guna mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu sistem informasi yang baik harus mengakomodir masukan dan saran dari pengguna. Sistem informasi penyusunan E-RKBMN yang dibuat telah dilakukan uji publik kepada 29 operator penyusun RKBMN di lingkungan UNNES.

Sistem informasi ERKBMN setelah uji coba kemudian dilaksanakan uji publik kepada 29 operator penyusun RKBMN. Berdasarkan hasil uji coba publik dapatkan hasil sebagai berikut :

a. Karakteristik Responden

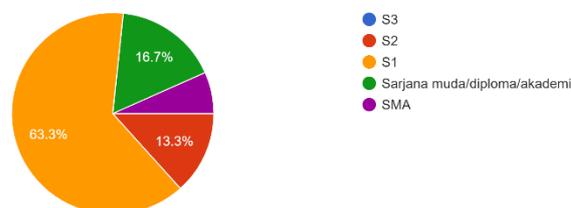
1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin
30 responses



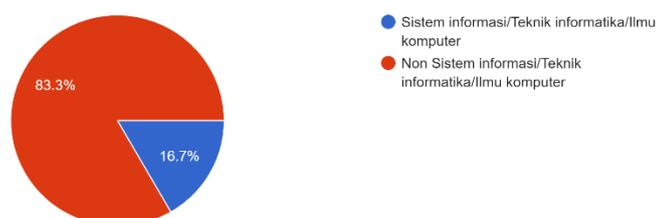
2. Karakteristik responden Jenjang Pendidikan formal

Jenjang Pendidikan formal :
30 responses



3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan formal

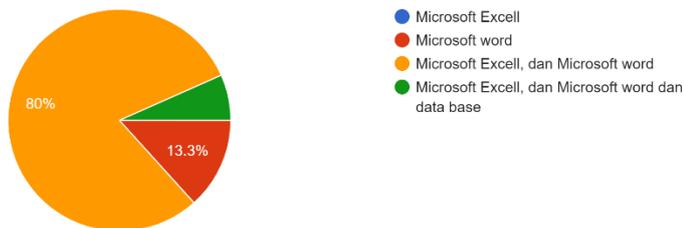
Latar belakang Pendidikan formal :
30 responses



4. Karakteristik responden Sistem operasi yang Suadara kuasai

Sistem operasi yang Saudara kuasai :

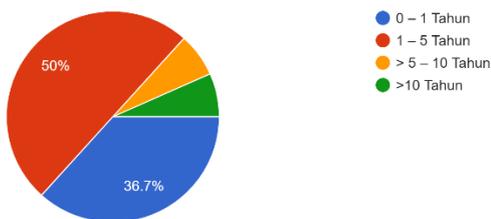
30 responses



5. Karakteristik responden lamanya keterlibatan dalam penyusunan RKBMN

Berapa tahun Saudara bisa terlibat di Penyusunan Anggaran/RKBMN :

30 responses

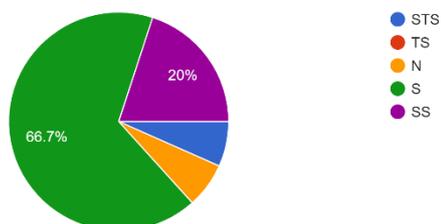


b. Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem E-RKBMN

1. Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan memenuhi kebutuhan pemrosesan RKBMN di unit saya

Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan memenuhi kebutuhan pemrosesan RKBMN di unit saya

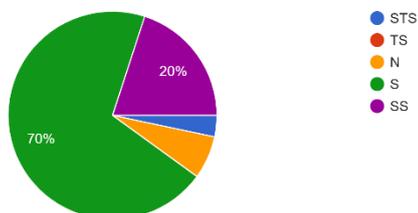
30 responses



2. Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan efisien

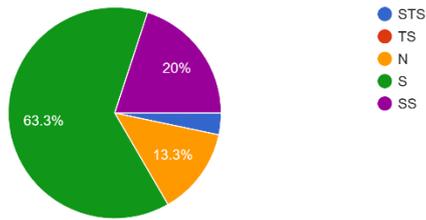
Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan efisien

30 responses



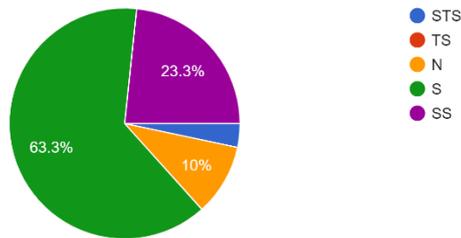
3. Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan efektif

Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan efektif
30 responses



4. Secara keseluruhan saya puas dengan sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan

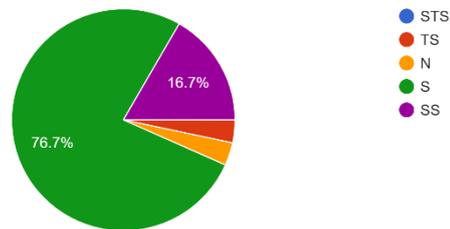
Secara keseluruhan saya puas dengan sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan
30 responses



c. Minat Penggunaan

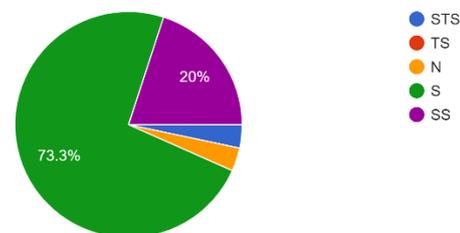
1. Seandainya boleh memilih saya berminat menggunakan sistem informasi ini untuk melakukan E-RKBMN

Seandainya boleh memilih saya berminat menggunakan sistem informasi ini untuk melakukan E-RKBMN
30 responses



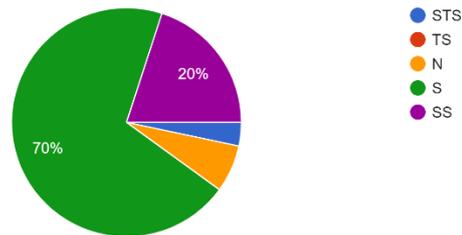
2. Seandainya boleh memilih sebisa mungkin saya akan menggunakan sistem informasi ini secara teratur

Seandainya boleh memilih sebisa mungkin saya akan menggunakan sistem informasi ini secara teratur
30 responses



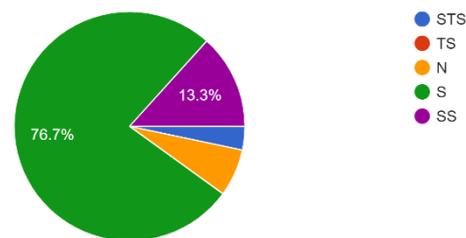
3. Seandainya boleh memilih saya akan menggunakan sistem informasi ini seterusnya

Seandainya boleh memilih saya akan menggunakan sistem informasi ini seterusnya
30 responses



4. Seandainya boleh memilih saya lebih suka menggunakan sistem informasi ini dalam melakukan pekerjaan saya

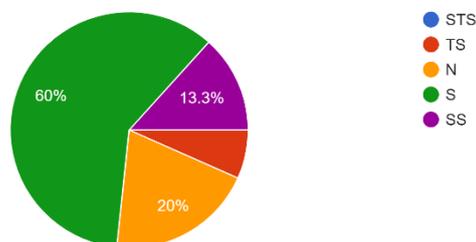
Seandainya boleh memilih saya lebih suka menggunakan sistem informasi ini dalam melakukan pekerjaan saya
30 responses



d. Kualitas informasi

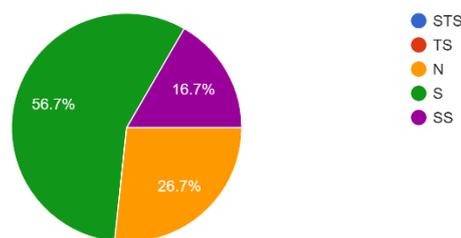
1. Output informasi dari sistem informasi E-RKBMN sama dengan input

Output informasi dari sistem informasi E-RKBMN sama dengan input
30 responses



2. Saya puas dengan akurasi sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan

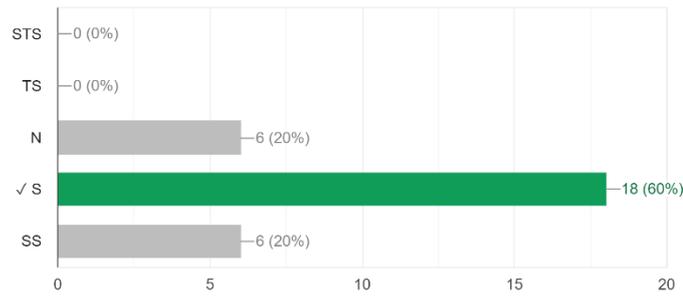
Saya puas dengan akurasi sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan
30 responses



3. Informasi dari sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan jelas

Informasi dari sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan jelas

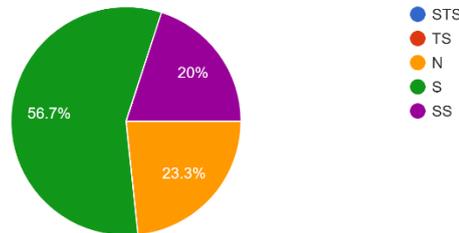
18 / 30 correct responses



4. Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan akurat

Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan akurat

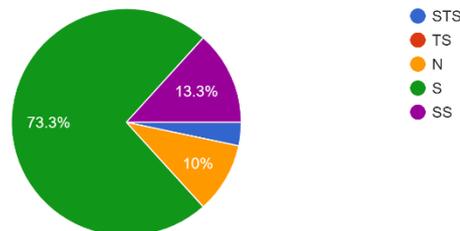
30 responses



5. Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan menyediakan informasi yang cukup

Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan menyediakan informasi yang cukup

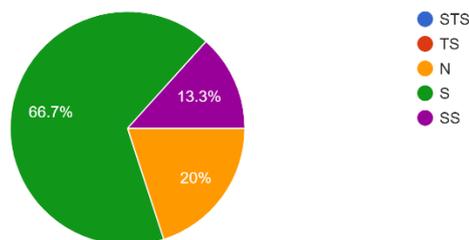
30 responses



6. Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan menyediakan sistem informasi yang up-to-date

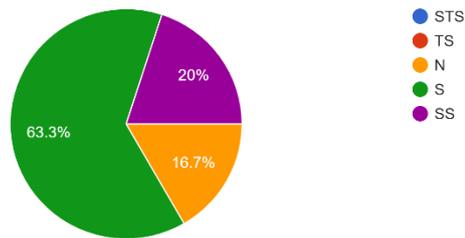
Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan menyediakan sistem informasi yang up-to-date

30 responses



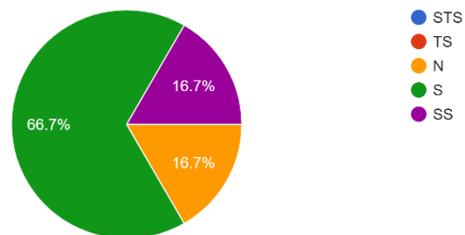
7. Saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan tepat waktu

Saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan tepat waktu
30 responses



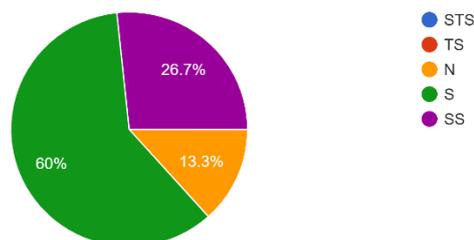
8. Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan menyediakan laporan seperti yang saya butuhkan

Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan menyediakan laporan seperti yang saya butuhkan
30 responses



9. Konten informasi dari sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan memenuhi kebutuhan saya

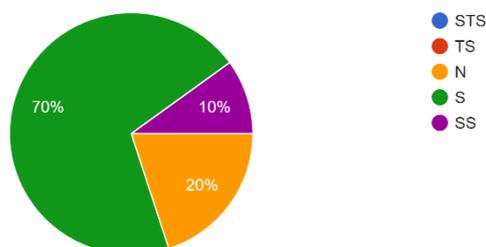
Konten informasi dari sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan memenuhi kebutuhan saya
30 responses



e. Kualitas Sistem Informasi

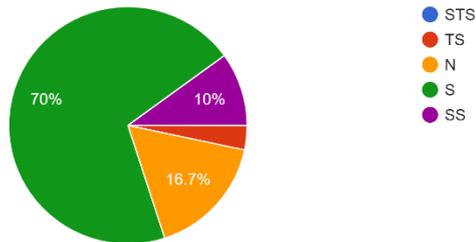
1. Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan mudah digunakan

Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan mudah digunakan
30 responses

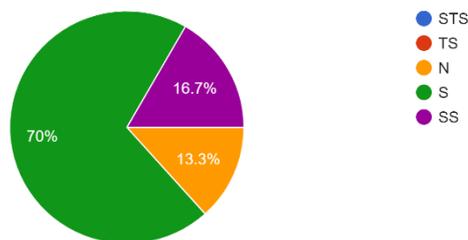


2. Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan user friendly

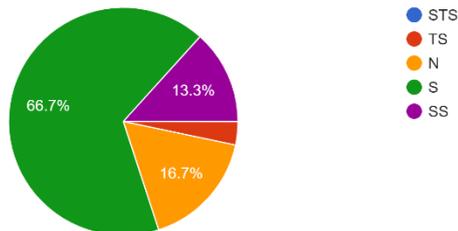
Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan user friendly
30 responses



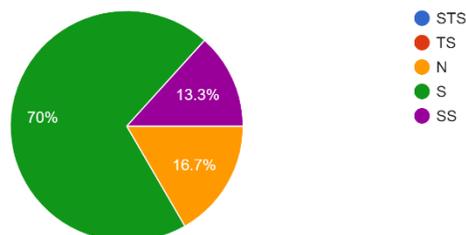
3. Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan mudah dipelajari
Sistem informasi E-RKBMN yang saya gunakan mudah dipelajari
30 responses



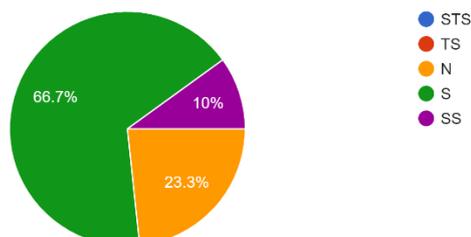
4. Mudah bagi saya untuk memakai sistem informasi E-RKBMN ini seperti yang saya mau
Mudah bagi saya untuk memakai sistem informasi E-RKBMN ini seperti yang saya mau
30 responses



5. Saya percaya bahwa sitem informasi E-RKBMN yang saya gunakan tidak rumit
Saya percaya bahwa sitem informasi E-RKBMN yang saya gunakan tidak rumit
30 responses



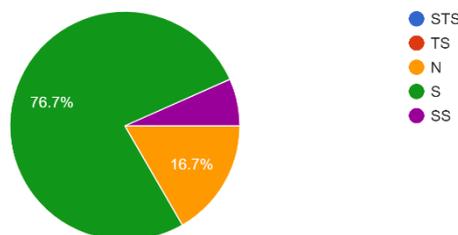
6. Menggunakan sistem informasi E-RKBMN ini tidak membutuhkan banyak usaha
Menggunakan sistem informasi E-RKBMN ini tidak membutuhkan banyak usaha
30 responses



7. Menggunakan sistem informasi E-RKBMN ini tidak membuat frustrasi

Menggunakan sistem informasi E-RKBMN ini tidak membuat frustrasi

30 responses



a. Karakteristik Responden

RKBMN dilingkungan UNNES. Hasil didapat untuk operator lebih cenderung didominasi jenis kelamin pria dengan perbandingan 73,3% dibandingkan perempuan hanya 26,7%. Berdasarkan penelitian mengenai jenjang pendidikan operator RKBMN dilingkungan UNNES jenjang S1 lebih cenderung mendominasi sebesar 63.3 %, Sarjana muda 16,6 %, S2 sebanyak 13,3 dan SMA sisanya. Berdasarkan penelitian mengenai pendidikan formal operator RKBMN dilingkungan UNNES lebih cenderung mendominasi bukan berasal dari IT sebesar 83.3 %. Operator RKBMN di lingkungan UNNES berdasarkan penelitian keterlibatan dalam penyusunan RKBMN banyak didominasi antara 1-5 Tahun sebesar 50 % dan kurang dari 1 tahun sebesar 38,7 %.

b. Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem E-RKBMN

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepuasan penggunaan sistem dengan menggunakan instrumen sebanyak 4 pertanyaan didapat hasil bahwa sistem ini tingkat terpenuhi kebutuhan sebesar 70 %, tingkat efisiensi 80 %, tingkat efektif 70 % dan tingkat kepuasan menyeluruh 70 %.

c. Minat Penggunaan

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat minat penggunaan sistem dengan menggunakan instrumen sebanyak 4 pertanyaan didapat hasil bahwa tingkat minat penggunaan sistem sebesar 80 %.

d. Kualitas informasi

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kualitas informasi dengan menggunakan instrumen sebanyak 9 pertanyaan didapat hasil bahwa tingkat minat penggunaan sistem sebesar 66,7 %.

e. Kualitas Sistem Informasi

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kualitas informasi dengan menggunakan instrumen sebanyak 7 pertanyaan didapat hasil bahwa tingkat minat penggunaan sistem sebesar 70 %.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji publik untuk sistem informasi penyusunan E-RKBMN yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan sistem Elektrik Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (E-RKBMN) Berbasis Web Sebuah Upaya Penguatan UNNES Menuju PTN Badan Hukum sangat membantu karena mudah dijalankan. Oleh karena itu sistem ini perlu ada perkembangan lebih lanjut.

REFERENSI

- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 50/KMK.06/2014, Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Bmn
- Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.06/2014 TENTANG Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penelaahan RKBMN

Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 642/KMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penelitian dan Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 451/KM.6/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Direktur Barang Milik Negara Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Keputusan Menteri Keuangan nomor 311/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

<https://mcity.id/peran-teknologi-informasi-terhadap-pelayanan-publik/#:~:text=Memberikan%20pelayanan%20publik%20yang%20prima%20merupakan%20tujuan%20setiap%20pemerintah%20daerah.&text=Dimana%20daerah%20dapat%20menggandakan%20teknologi,interaksi%20dengan%20masyarakat%20dan%20bisnis.>

<https://www.sevenmediatech.co.id/blog/view/manfaat-teknologi-informasi-pada-bidang-pemerintahan-atau-e-government->

<https://smkn1janapria.sch.id/baca-berita-6-jenisjenis-bahasa-pemrograman-berbasis-web-.html>

<https://www.sekawanmedia.co.id/bahasa-pemrograman-web/>